



BPK RI : Pemprov Kalbar Harus Benahi Pengelolaan Aset

Andika Lay
Harian Borneo, Pontianak

Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M. mengatakan, meski BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LPHP Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2014 namun, masih ada hal yang perlu mendapat perhatian pemprov Kalbar, diantaranya pengelolaan aset tetap. "Yang harus jadi perhatian Pemprov Kalbar adalah mengenai pengelolaan aset tetap seperti tanah,

peralatan pertanian, peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan pada enam SKPD," kata Prof Dr Bahrullah Akbar, Senin (8/6), usai di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalbar. Dikatakannya, keenam SKPD tersebut antara lain, Dinas Pertanian, Biro Umum, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta RSUD dr. Soedarso) yang dinilai belum cukup tertib.

Selain itu, juga terdapat kesalahan ... **Ke Halaman - 11**



Anggota VI BPK RI,
Prof. Dr. Bahrullah Akbar,
M.B.A., C.M.P.M. FOTO
Andika Lay / Harian Borneo.



BPK RI : Pemprov Kalbar Harus Benahi Pengelolaan Aset

penganggaran belanja daerah TA 2014 pada Dinas PU sebesar Rp 20,78 miliar. Ada juga soal LPJ atas belanja hibah sebesar Rp 420 juta dan belanja bantuan keuangan kepada parpol sebesar Rp 1,08 miliar yang belum disampaikan kepada Gubernur Kalbar.

Dalam upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan yang lebih baik, masih menurutnya, BPK RI Perwakilan Kalbar mendorong kepala daerah dan Kepala SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

"Kita juga berharap, agar Kepala SKPD dan Pemprov Kalbar bisa melakukan per-

baikan pengelolaan keuangan daerah agar dapat mempertahankan opini WTP," jelasnya. BPK RI juga meminta kepada Pemprov Kalbar untuk segera mengimplementasikan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis Akrua dan melakukan penguatan peran Inspektorat.

BPK RI juga berharap agar pemerintah daerah dan DPRD dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah. Sesuai dengan amanat UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, pejabat wajib

menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil tindak lanjutnya ke BPK RI Perwakilan Kalbar selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Terkait permasalahan aset tersebut, Sekda Kalbar, DR Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM menjelaskan, pihaknya telah meminta semua jajarannya, agar permasalahan yang belum terselesaikan, secepatnya diselesaikan dan jangan lagi mengulur-ngulur waktu. "Jangan sampai penyelesaian permasalahan aset yang lambat berakibat merugikan Pemerintah Daerah," kata DR Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM, usai mendampingi Gubernur

Kalbar menerima Penghargaan Opini WTP di Gedung DPRD Kalbar. Dikatakannya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Provinsi Kalbar bukan didapatkan secara mudah, semuanya butuh perjuangan dan kerja keras.

Laporan keuangan yang baik, tetapi memiliki aset yang bermasalah sama saja, bahkan bisa memengaruhi. Untuk mempertahankan opini tersebut, perlu kerja sama dengan baik dan saling mendukung dalam rangka menciptakan pengelolaan aset yang handal dan akuntabel, sehingga pada pemeriksaan tahun 2015 nanti dan seterusnya kita mampu mempertahankan opini WTP," ujarnya.